

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan dijelaskan terkait latar belakang masalah yang membahas letak geografis negara Filipina serta menjelaskan awal mula bagaimana konflik agama yang terjadi antara Bangsamoro dengan pemerintah dapat terjadi, dan akan di jelaskan juga terkait rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian yang penulis pakai pada penelitian ini.

1.1 Latar Belakang Masalah

Filipina merupakan negara di wilayah Asia Tenggara yang berbentuk republik yang letaknya strategis diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta Benua Asia dan Australia. Filipina memiliki perbatasan negara yang mencangkup wilayah kepulauan yang memiliki luas daratan sebesar 300.000 km persegi. Sebagainegara kepulauan terbesar ke 2 di dunia, Filipina memiliki 7.641 pulau dengan 3 pulau utama yaitu Visayas, Luzon serta Mindanao. Filipina merupakan negara multi-etnis serta multi agama dalam sosio-kultural, yang tercermin dalam keragaman dialek dan agama yang berbeda. Dikarenakan Filipina wilayahnya luasdan mempunyai suku bangsa yang beragam, Permasalahan negara seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, perpecahan, dan bencana alam kerap terjadi di negara tersebut. Disintegrasi menjadi salah satu masalah yang paling umum di Filipina. Salah satu permasalahan disintegrasi di Filipina yang mendapat sorotan pada cakupan Internasional yaitu Pemberontakan Bangsamoro. (Puspaningrum, 2022)

Bangsamoro telah mengalami berbagai permasalahan dari banyak pihak yang dibagi menjadi 3 periode: pertama, perlawanan Bangsamoro terhadap penjajahan Spanyol pada abad ke-16. Tujuan kedatangan bangsa Spanyol ke Filipina adalah untuk menduduki Filipina dan menyebarkan agama Kristen kepada penduduk pribumi. Sejarah Panjang inilah yang menjadi awal mula perlawanan Bangsamoro terhadap pemerintah yang melakukan diskriminasi dan membatasi hak

konstitusional mereka. Kedua, invasi Amerika Serikat yang berlangsung selama 47 tahun, yaitu dari tahun 1896-1946. Ketiga, gerakan perlawanan Bangsamoro terhadap pemerintahan Filipina yang berlangsung pada tahun 1970an. (Arifal,2022)



Gambar 1. Batas-Batas Negara Filipina.

Mindanao merupakan salah satu daerah di Filipina yang sebagian besar penduduknya memeluk agama islam. Bangsamoro menjadi sebutan bagi mereka orang-orang yang beragama islam di Mindanao. istilah *Moro* di perkenalkan oleh penjajah Spanyol selama negara Filipina ini dijajah oleh bangsa Spanyol. Pengertian *Moro* sendiri dikaitkan di Spanyol sebagai orang-orang yang memeluk agama islam yang datang serta menaklukan Spanyol pada abad sebelumnya. Istilah Moro di Filipina tidak mengacu pada etnis atau ras tertentu, namun kata *Moro* merujuk pada penduduk Filipina, khususnya wilayah Mindanao yang beragama Islam. Masyarakat muslim di Mindanao menjadi mayoritas di kawasan otonomi ARMM (*The Autonomous Region in Muslim Mindanao*). (Humas, 2022)

Pada awal abad ke-16, orang-orang Spanyol datang ke Filipina dengan tujuan *Gold, Gospel, dan Glory*. Salah satu misi kedatangan Spanyol yang membuat warga Mindanao geram akan hal itu yaitu mengkristenkan Muslim Filipina di Mindanao yang dimana mayoritas penduduk Filipina beragama katolik. Dari situlah konflik antara Islam dan Kristen di Filipina bermula ketika umat Islam di Mindanao menentang misi Kristen Spanyol. Perang antara Islam dan Kristen tidak bisa

dihindari. Tragedi ini kemudian dikenal dengan nama Perang Moro dan memunculkan definisi negatif tentang penafsiran kata Moro. Suku Moro dianggap sebagai kelompok masyarakat yang bodoh, kasar dan tidak berpendidikan. Kata *Moro* tentu saja mengacu pada umat Islam, sedangkan umat kristen di Filipina dikenal dengan sebutan *Indio*. (Prasetyowati, 2017)

Di periode selanjutnya yaitu invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Pada saat terjadinya kolonialisasi oleh Amerika Serikat, sikap etnis Mindanao berbanding terbalik dengan rezim Spanyol. Etnis Mindanao menunjukkan sikap yang lebih kooperatif serta bersahabat. Hal tersebut dikarenakan Amerika Serikat tidak memperlakukan identitas etnis Mindanao yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Namun, hubungan baik antara Masyarakat Islam Mindanao dengan AS tidak berlangsung lama. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan yang dibuat oleh AS untuk etnis Mindanao yang dimana *Datus* di Mindanao tidak setuju dan mereka melakukan aksi protes serta mengirim petisi atas kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut dikenal dengan nama Bacon Bill, yaitu kebijakan untuk membuat negara baru di Filipina dengan menggabungkan Masyarakat Utara (Kepulauan Luzon) dan Masyarakat Selatan (Kepulauan Mindanao) dengan pusat pemerintahan di Luzon. Namun, pemerintah terus melanjutkan program Bacon Bill di mana kemudian wilayah Mindanao menjadi wilayah administratif dan politik dari Filipina. (Prasetyowati, 2017)

Periode ketiga yaitu gerakan perlawanan Bangsa Moro terhadap pemerintahan Filipina. Pasca kemerdekaan Filipina, konflik antara pemerintah Filipina dengan Masyarakat Mindanao terjadi. Kebijakan dari Manuel Quezon yang ingin menghapuskan struktur budaya, hukum serta politik yang berbasis hukum positif di Filipina mendapat kecaman karena dapat mengancam identitas Islam yang sudah bertumbuh kembang di Mindanao sejak abad ke 15. Dan konflik kembali memanas pada masa pemerintahan Ferdinand Marcos (1965-1986). Sejak tahun 1960an sampai awal 1970an terjadi perlawanan antara pendatang Kristen Filipina bagian utara Filipina dan penduduk asli masyarakat Muslim Moro di wilayah Mindanao bagian selatan Filipina. Perlawanan tersebut berawal dari adanya perpindahan

penduduk kristen ke tempat tinggal orang-orang Islam di Mindanao. Dampak dari peristiwa tersebut banyak tanah-tanah milik orang Islam di Mindanao diduduki dan dimiliki secara paksa oleh pendatang katolik. Permasalahan tanah tersebut menandai semakin memuncaknya konflik antara Muslim Moro dan Katolik Filipina, akibat dari konflik tersebut melahirkan organisasi-organisasi dari kelompok Katolik pendatang dan penduduk asli Muslim Moro di Mindanao. Organisasi Islam Moro yang muncul di Filipina Selatan ada 3, yaitu: pertama, MNLF (*Moro National Liberation Front*) adalah organisasi Islam yang bertujuan untuk kemerdekaan diri (*Self-Determination*), kedua, MILF kelompok pecahan dari MNLF yang memisahkan diri dari MNLF pada tahun 1977 akan tetapi secara resmi baru didirikan pada tahun 1984, dan ketiga, kelompok Abu Sayaf didirikan pada tahun 1991. (Reskiyanti, 2014)

Gerakan yang paling berpengaruh pada saat itu yaitu *Moro Islamic Liberation Front* (MILF). MILF merupakan satu satunya gerakan yang berideologikan Islam murni, beda halnya dengan MNLF yang berideologikan Nasionalis-Sekuler. MILF dalam perjuangannya ingin mendapatkan kembali kemerdekaannya yang telah dirampas secara immoral dan ilegal oleh pemerintah Filipina, serta ingin menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan pemerintah Filipina (*Right to self-determination*). *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) ini memiliki sebanyak 46 *camp Mujahidin*. MILF juga memiliki tentara yaitu “*Bangsamoro Islamic Armed Forces* (BIAF)” sejumlah 8000 tentara. Anggota MILF ini diperkirakan telah tersebar rata di Pulau Mindanao yaitu masyarakat Manguindanao sebanyak 1,6 juta orang, masyarakat Maranao sebanyak 1,9 orang, serta sisanya merupakan masyarakat yang berasal dari Cotabato dan Basilan. Hal tersebut membuktikan bahwa MILF merupakan organisasi yang memiliki banyak dukungan dari Bangsamoro dibandingkan organisasi lainnya. (Yolanda Tandio, 2017)

MILF adalah organisasi perlawanan Muslim Moro yang dipimpin oleh Salamat Hasyim pada tahun 1984. Kebijakan gerakan perlawanan gerakan separatis mengikuti apa yang diyakini sebagai pandangan jihad. Pemikiran radikal gerakan ini juga dipengaruhi oleh pemikiran radikal yang berkembang di Timur Tengah. hal

tersebut di buktikan dengan adanya kerjasama antara gerakan MILF dengan Al-Qaeda, jaringan teroris yang berasal dari Timur Tengah. MILF mengoperasikan kamp pelatihan yang digunakan oleh Al-Qaeda untuk melakukan operasi pelatihan militer. Di sisi lain, MILF mendapat bantuan berupa tambahan dana dan senjata untuk melakukan operasi perlawanan. Serangan yang dilakukan MILF antara lain serangan militer, penculikan, dan pemboman. Beberapa serangan yang dilakukan gerakan ini juga ditemukan terkait dengan jaringan teroris lain seperti ASG, JI, dan Al-Qaeda. (MS, 2017)

Konflik yang terjadi antara MILF dengan Pemerintah Filipina ini berlangsung sangat lama dan dalam penyelesaiannya konflik tersebut mengalami pasang surut. Sudah banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para presiden yang pada saat itu menjabat, namun masih belum menemukan titik terang. Hingga pada masa pemerintahannya Presiden Rodrigo Duterte (2016-2022) intensitas permasalahan tersebut mulai menurun. Latar belakang Duterte juga menjadi salah satu pengaruh atas keberhasilannya dalam mencapai perdamaian. Duterte mengklaim bahwa ia keturunan Bangsamoro yang berasal dari ibunya serta Duterte merupakan mantan walikota Davao yang juga berasal dari Mindanao. Selama Duterte menjabat sebagai walikota Davao, Duterte dinilai sebagai pemimpin yang kontroversial. Duterte berhasil menjadikan kota Davao menjadi kota yang aman dan jauh dari adanya kejahatan. Hal tersebut dikarenakan Duterte dalam membuat kebijakan tidak segan-segan, bahkan ia berani untuk mengeksekusi siapapun jika itu berhubungan dengan kejahatan. Sikap keras dan disiplin ini yang membawa Duterte memimpin kota Davao selama 3 periode. Sikap Duterte inilah yang membawa nya memperoleh banyak dukungan dari Masyarakat untuk mencalonkan diri nya sebagai presiden. Setelah ia menjadi presiden, konflik antara pemerintah Filipina dengan kelompok separatis Mindanao (MILF) ini yang menjadi sorotan baginya. Kebijakan yang dibuatnya dinilai sebagai terobosan yang konkrit pemerintahannya dalam mewujudkan upaya perdamaian di wilayah Filipina yang selama ini selalu berakhir dalam kegagalan oleh rezim terdahulu.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan pemerintah Filipina serta apa saja usaha Gerakan MILF dalam menyelesaikan konflik tersebut. Dengan menjabarkan latar belakang masalah, memaparkan tindakan-tindakan perlawanan serta upaya perundingan penyelesaian konflik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang muncul pada penelitian ini adalah “Bagaimana Strategi Presiden Filipina (Rodrigo Duterte) dalam mengatasi aksi pemberontakan *Moro Islamic Liberation Front*?”

1.3 Kerangka Teori

Dalam rangka menjawab pokok permasalahan dan menarik hipotesa, maka dalam karya penelitian ini penulis akan didukung oleh pendekatan teori yang relevan dengan tema yang sedang dibahas yang akan diuraikan sebagai berikut.

1. Teori Resolusi Konflik

Konflik merupakan suatu kejadian sosial yang tidak dapat dihindarkan karena sifat manusia yang memiliki banyaknya kebutuhan, minat, serta sudut pandang. Konflik tersebut banyak bermula dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, maka dari itu untuk menyelesaikannya perlu adanya upaya untuk mengakui bahwa kebutuhan itu benar adanya dan tidak dipenuhi oleh lawan konflik yang menuntut hak-haknya (Kriesberg, 2013). Berdasarkan pernyataan tersebut, maka pihak yang mejadi lawan pada konflik tersebut dituntut untuk dapat mengubah kondisi tersebut. Untuk mengatasi konflik, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan resolusi konflik. Konflik yang dinilai rumit dan sudah mengarah pada peperangan perlu adanya upaya perubahan yang dapat menyelesaikan konflik.

Landasan teori yang digunakan mengenai resolusi konflik ini yaitu menurut Killen, Ardila-rey serta Barakkatz dalam Gayle Mindes (2006)

Dimana mereka mengartikan resolusi konflik merupakan suatu tindakan mencari solusi untuk menyelesaikan perbedaan dengan mengedepankan Pembangunan sosial serta moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan. Kemunculan konflik disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap pihak atau pihak-pihak lain serta tujuan-tujuannya saling berlawanan. Menguatnya konflik juga sering dipicu dengan adanya provokasi para pihak yang terlibat. Provokasi bisa berupa persuasi, koersi dan balas jasa atau iming-iming baik material maupun non-material, bahkan bisa juga provokasi berupa gabungan dari ketiganya. Untuk menyelesaikan konflik, tulisan ini akan menyajikan suatu model yang dianggap paling relevan dengan topik bahasan. Model itu adalah model intervensi pihak ketiga dalam bentuk mediasi dan negosiasi. Secara paling sederhana, pihak ketiga dapat didefinisikan sebagai individu atau kolektif yang berada di luar konflik antara dua pihak atau lebih dan mencoba membantu mereka untuk mencapai kesepakatan.

Dalam hal ini, penulis menggunakan mediasi yang merupakan pihak ketiga yang berfungsi untuk menjembatani penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat. Mediasi adalah sebuah tindakan intervensi pihak luar untuk menyelesaikan konflik bersama. Mediasi bekerja untuk menciptakan proses perdamaian terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik melalui dialog politik yang konstruktif, atau untuk mengubah proses dialog menjadi sebuah resolusi konflik dan pembuatan perdamaian. Hal ini relevan dengan bagaimana proses rezim-rezim terdahulu dalam menyelesaikan konflik dengan membuat sebuah grup yang berisikan negara-negara yang ingin membantu menyelesaikan konflik ataupun *Non-Governmental Organizations (NGOs)* sebagai pihak ketiga. *International Contact Group (ICG)* merupakan salah satu organisasi yang ditujukan sebagai bentuk mediasi serta menjembatani agar konflik tersebut dapat terselesaikan. Dalam konflik ini, ICG sangat berperan penting dalam penyelesaian konflik dengan ikut turut andil

dengan adanya penandatanganan *Framework Agreement of Bangsamoro (FAB)* dan *Comprehensive Agreement on the Bangsamoro (CAB)*. Pada masa pemerintahan preesiden Benigno Aquino III, terbentuknya FAB dan CAB ini berpengaruh pada terbentuknya *Bangsamoro Basic Law (BBL)* nantinya akan menghasilkan *Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM)*. Namun, undang-undang *Bangsamoro Basic Law (BBL)* ini gagal diratifikasikan dikarenakan kongres masih tidak percaya dengan MILF dan BBL dianggap tidak konstitusi. Hingga pada akhirnya, masa kepresidenan digantikan oleh presiden Rodrigo Duterte yang nantinya isi undang-undang BBL ini akan diperbaharui kembali dan namanya akan berganti menjadi *Bangsamoro Organic Law (BOL)*. (Sarira, 2018)

1.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban (dugaan) sementara dari masalah suatu penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana Strategi Presiden Filipina (Rodrigo Duterte) dalam mengatasi Ancaman Gerakan *Moro Islamic Liberation Front*?. Berikut merupakan perumusan hipotesis dari penelitian ini ialah undang-undang *Bangsamoro Organic Law (BOL)* merupakan undang-undang hasil perbaharuan dari undang-undang *Bangsamoro Basic Law (BBL)* pada masa pemerintahan Benigno Aquino III. *Bangsamoro Organic Law (BOL)* dinilai sebagai terobosan yang progresif dalam mewujudkan perdamaian pada masa pemerintahan presiden Rodrigo Duterte.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasar pada latar belakang serta pokok permasalahan yang tercantum diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui awal mula terjadinya konflik antara Pemerintah Filipina dengan Masyarakat Muslim Moro di Filipina Selatan.
- b. Untuk mengetahui perlawanan apa saja yang dilakukan kelompok perlawanan muslim Moro (MILF) terhadap pemerintah Filipina.

- c. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian konflik antara pemerintah Filipina dengan kelompok perlawanan Masyarakat muslim Moro (MILF) pada masa pemerintahan presiden Rodrigo Duterte.

1.6 Jangkauan Penelitian

Pada penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana presiden Rodrigo Duterte menyelesaikan konflik yang terjadi di negara nya. Pembahasan tersebut akan dimulai dari penyelesaian konflik pada masa pemerintahan presiden Rodrigo Duterte (2016-2022) menjabat. Hal tersebut dikarenakan di tahun tersebut intensitas jangkauan waktu pada penelitian ini meliputi batasan tahun intensitas konflik antara pemerintah Filipina dengan MILF sudah mulai menurun.

1.7 Metode Penelitian

Terdapat tiga macam jenis penelitian yang pada lazimnya digunakan dalam menggambarkan suatu jenis penelitian, yaitu penelitian secara eksploratif, deskriptif, dan eksplanatif. Untuk menjelaskan permasalahan yang akan dibahas, maka penelitian yang digunakan ialah penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara spesifik mengenai fenomena yang terjadi serta perilaku dari aktor-aktor serta faktor-faktor historis.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penulisan kualitatif. Menurut Maelong, Metode Kualitatif merupakan sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas. Tujuan dari penelitian kualitatif yaitu untuk menemukan informasi terkait permasalahan yang terjadi dengan sedetail mungkin. Jika data yang diperoleh semakin mendalam, maka kualitas pada penelitian tersebut akan bagus. (Nanda, 2023)

Subjek pada penelitian ini akan tertuju pada konflik yang terjadi antara pemerintah Filipina dengan kelompok MILF. Pada penelitian ini juga akan memaparkan bagaimana latar belakang konflik tersebut terjadi, serta akan dipaparkan juga apa saja kejadian-kejadian yang terjadi selama konflik

berlangsung. Selain itu, objek pada penelitian ini akan terfokus pada bagaimana strategi pemerintah Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte dalam menangani konflik tersebut.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan melakukan studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian yang terdapat di dalam buku, jurnal, maupun artikel yang berkaitan dengan topik yang ada di dalam penelitian (Corbin, 1998). Hal ini dapat memudahkan penulis untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini. (Eka Diah Kartiningrum, 2015)

1.8 Sistematika Penelitian

Sistematis penelitian ini terbagi atas tiga bab dan tiap-tiap bab terbagi atas beberapa sub-bab sebagai berikut:

- **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan dari keseluruhan isi penulisan, yang berisikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

- **BAB II : DINAMIKA PERKEMBANGAN KONFLIK MILF DENGAN PEMERINTAH FILIPINA**

Pada bab ini akan memaparkan bagaimana Gerakan MILF ini terbentuk, bagaimana MILF disebutkan sebagai gerakan teroris, menjelaskan apa saja kepentingan MILF pada konflik tersebut, bagaimana konflik MILF dengan para pemerintah terdahulu sebelum Duterte menjabat,

- **BAB III : STRATEGI PRESIDEN RODRIGO DUTERTE DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK**

Dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang presiden Duterte, apa saja tindakan yang diambil dan strategi apa saja yang dilakukan

presiden Duterte dalam menangani konflik tersebut. serta apa saja kebijakan yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berkonflik.

- **KESIMPULAN**

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan penulis penelitian secara keseluruhan, serta saran yang dapat diberikan dalam menganalisa masalah yang dibahas pada penelitian tersebut.